



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Cirebon, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu memudahkan melakukan control terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.



Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen – dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola PD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;



19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Secara keseluruhan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis DISHUB Kota Cirebon Tahun 2018-2023 disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA DISHUB serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.



2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 (Delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2018 – 2023

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERHUBUNGAN**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

##### **I. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon disingkat DISHUB Kota Cirebon, DISHUB Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan

##### **II. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### III. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

#### a. Unsur Organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;
- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

#### b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
  - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
  - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
  - c. Seksi Terminal dan Multimoda.
5. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

- b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional.

- 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

**A. Kepala Dinas**

1. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

**B. Sekretariat**

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Dinas

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;

- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  - d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
  - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
  - g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
  - h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - (1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
    - (2) Fungsi
      - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
      - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
      - c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
      - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
      - e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Perhubungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Lalu Lintas**

#### 1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang lalu lintas.

#### 2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Lalu Lintas;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Lalu Lintas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### 3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :

##### a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

##### (1) Tugas Pokok

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas penyelenggaraan manajemen lalu lintas.

##### (2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan

- Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
- (1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan rekayasa lalu lintas.
  - (2) Fungsi
    - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
    - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
    - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Prasarana Lalu Lintas
- (1) Tugas Pokok  
Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan prasarana lalu lintas.
  - (2) Fungsi
    - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
    - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
    - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;
    - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;
    - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
    - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;
    - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan  
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

#### **D. Bidang Angkutan dan Multimoda**

1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan angkutan dan multimoda.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:

a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

(1) Tugas Pokok

Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan dalam trayek.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan;
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

(1) Tugas Pokok

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam

- Trayek dan Angkutan Barang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Terminal dan Multimoda
- (1) Tugas Pokok  
Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan terminal dan multimoda.
  - (2) Fungsi
    - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
    - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan

- Multimoda;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **E. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana**

##### 1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan keselamatan dan tehnik sarana.

##### 2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;

- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, membawahkan:
- a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan
    - (1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan audit dan investigasi keselamatan.
    - (2) Fungsi
      - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
      - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
      - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
      - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
      - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
      - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
      - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan
      - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyuluhan Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyuluhan keselamatan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Pengendalian dan Operasional

(1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengendalian dan operasional.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

**F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)**

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**G. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon, merupakan satuan kerja yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan, adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari:

Tabel II.1

Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	3	57	47	5	112
2	Perempuan	-	5	9	-	14
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>126</b>

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, Oktober 2018

Tabel II.2  
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.I	D.III	D.IV	S1	S2	
1	LAKI-LAKI	2	2	52	2	12	1	34	7	112
2	PEREMPUAN	-	-	5	-	3	-	6	-	14
JUMLAH TOTAL										126

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, Oktober 2018

Tabel II.3  
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	2	-	2
4	Eselon IV/a	12	-	12
5	Eselon IV/b	2	1	3
JUMLAH TOTAL				19

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, Oktober 2018

Dari total keseluruhan 126 orang personil Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Non PNS 9 orang yang tersebar di sekretariat, bidang lalu lintas dan UPT pengujian kendaraan bermotor.

## 2. Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon dapat dilihat pada **Tabel II.4** berikut ini :

Tabel II.4

## Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
1	Tanah untuk Bangunan Gedung (gedung dishub)	1.619	M <sup>2</sup>
2	Terminal Darat	37.240	M <sup>2</sup>
3	Portable Compressor	1	Buah
4	Kendaraan Roda 6	2	Unit
5	Kendaraan Roda 4	11	Unit
6	Kendaraan Roda 3	1	Unit
7	Kendaraan Roda 2	44	Unit
8	Water Pump	1	Buah
9	Mesin Kompresor	1	Buah
10	Mesin Las Listrik	1	Buah
11	Mesin Gergaji	1	Buah
12	GPS	1	Buah
13	Alat Ukur/Pembanding Lain-Lain	11	Buah
14	Mesin Ketik	10	Buah
15	Mesin Hitung	14	Buah
16	Lemari Besi	19	Buah
17	Rak Besi/Metal	8	Buah
18	Rak Kayu	1	Buah
19	Filling Besi/Metal	2	Buah
20	Brankas	3	Buah
21	Lemari Sorok	3	Buah
22	Alat Penghancur Kertas	4	Buah
23	Papan Pengumuman	2	Buah
24	Mesin Absensi	4	Buah
25	Genset	4	Set
26	Lemari Kayu	8	Buah
27	Meja Besi	7	Buah
28	Meja Kayu	129	Buah
29	Kursi Besi/Metal	227	Buah
30	Meja Rapat	12	Buah
31	Meja Reception	4	Buah
32	Meja Panjang	1	Buah
33	Kursi Tamu	27	Buah
34	Kursi Putar	68	Buah
35	Kursi Lipat	101	Buah
36	Meja Komputer	22	Buah
37	Lampu Lalu Lintas	8	Unit
38	Mesin Penghisap Debu	3	Buah
39	Mesin Potong Rumput	3	Buah
40	AC	73	Unit
41	Kipas Angin	9	Unit
42	Exhause Fan	10	Unit
43	Televisi	16	Unit



No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
44	Kompas Gas	1	Buah
45	Tabung Gas	1	Buah
46	Amplifier	1	Unit
47	Loudspeaker	19	Unit
48	Sound System	2	Unit
49	Wireless	218	Set
50	Microphone Table Stand	14	Unit
51	Unit Power Supply (UPS)	18	Unit
52	Tustel	4	Buah
53	Tangga Aluminium	2	Buah
54	Mimbar/Podium	2	Buah
55	Handy Cam	4	Buah
56	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	266	Buah
57	Alat Pemadam Portable	16	Buah
58	PC Unit	36	Buah
59	Laptop	32	Buah
60	Personal Komputer Lain-Lain	31	Buah
61	Printer	52	Buah
62	Scanner	4	Buah
63	Monitor	31	Unit
64	Hardisk Eksternal	10	Buah
65	Server	15	Unit
66	Router	53	Unit
67	Hub	52	Unit
68	Modem	3	Unit
69	Peralatan Jaringan Lain-Lain	19	Unit
70	Radio Access Point	3	Unit
71	Switch Hub	20	Unit
72	Buffet Kayu	5	Buah
73	Camera + Attachment	5	Buah
74	Proyektor + Attachment	7	Buah
75	Audio Amplifier	1	Buah
76	Digital Audio Tape Recorder	1	Buah
77	Tripod Camera	1	Buah
78	Photo Tustel	4	Buah
79	Layar Film	4	Buah
80	Theodolit	1	Buah
81	Megaphone	1	Buah
82	Telephone (PABX)	3	Buah
83	Pesawat Telepon	29	Unit
84	Handy Talky	68	Unit
85	Facsimile	1	Unit
86	Gury Tower	48	Unit
87	Alat Uji Gas Buang	2	Unit

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
88	Balon Karet	10	Buah
89	CCTV	4	Unit

Kondisi prasarana dan sarana di Dinas Perhubungan Kota Cirebon cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah.

#### a. Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset Tetap yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota seperti tabel di bawah ini :

Tabel II.5  
DAFTAR ASSET  
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON  
PERIODE : 01 JANUARI 2017 – 31 DESEMBER 2017

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
<b>A</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	9.776.453.221
3	Gedung dan Bangunan	10.039.317.663
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	5.761.131.050
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0
	<b>Jumlah Aset Tetap :</b>	<b>25.576.901.934</b>



NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
<b>B</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
1	Aset Tak Berwujud	43.790.000
2	Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.598.685.750
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
	<b>Jumlah Aset Lainnya :</b>	<b>1.642.475.750</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL GABUNGAN (A+B)</b>	<b>27.219.377.684</b>

Sumber : DISHUB Kota Cirebon

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (Renstra)	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(19)	(20)
1	Menurunnya angka kecelakaan dan daerah rawan kemacetan	-	-	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	-	-	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra DISHUB 2017 – 2018

Dari tabel diatas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2017 dapat diukur dengan perhitungan persentase pencaapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :



- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik “, maka digunakan rumus

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \text{EMBED}$$

Equation.3 | }

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana} =$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- $X \geq 85$  = Baik
- $75 \% < X < 85 \%$  = Cukup
- $55 \% < X < 75 \%$  = Sedang
- $X \leq 55$  = Kurang



**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018 (s.d Triwulan III)	2017	2018 (s.d Triwulan III)	2017	2018 (s.d Triwulan III)	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 3.899.000.000</b>	<b>Rp 4.404.000.000</b>	<b>Rp 3.009.211.635</b>	<b>Rp 2.341.374.964</b>	<b>77,18%</b>	<b>53,16%</b>	<b>168.333.333,33</b>	<b>(222.612.223,67)</b>
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 2.000.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 1.585.666.000	Rp 1.355.109.500	79,28%	54,20%	166.666.666,67	(76.852.166,67)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 1.755.000.000	Rp 1.755.000.000	Rp 1.389.179.335	Rp 970.155.464	79,16%	55,28%	-	(139.674.623,67)
Retribusi Terminal	Rp 20.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%	(6.666.666,67)	-
Retribusi Ijin Trayek	Rp 100.000.000	Rp 125.000.000	Rp 10.250.000	Rp -	10,25%	0,00%	8.333.333,33	(3.416.666,67)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 24.116.300	Rp 16.110.000	100,48%	67,13%	-	(2.668.766,67)



Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018 (s.d Triwulan III)	2017	2018 (s.d Triwulan III)	2017	2018 (s.d Triwulan III)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp 11.708.680.000</b>	<b>Rp 14.093.546.000</b>	<b>Rp 10.664.094.663</b>	<b>Rp 10.882.865.531</b>	<b>91,08%</b>	<b>77,22%</b>	794.955.333,33	72.923.622,67
Belanja Pegawai	Rp 11.708.680.000	Rp 14.093.546.000	Rp 10.664.094.663	Rp 10.882.865.531	91,08%	77,22%	794.955.333,33	72.923.622,67
<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp 23.247.943.900</b>	<b>Rp 19.464.451.000</b>	<b>Rp 22.876.155.276</b>	<b>Rp 12.745.712.693</b>	<b>98,40%</b>	<b>65,48%</b>	(1.261.164.300,00)	(3.376.814.194,33)
Belanja Pegawai	Rp 1.819.623.500	Rp 181.337.600	Rp 1.781.573.500	Rp 105.097.600	97,91%	57,96%	(546.095.300,00)	(558.825.300,00)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 20.299.688.375	Rp 17.616.487.050	Rp 19.983.247.076	Rp 12.008.576.093	98,44%	68,17%	(894.400.441,67)	(2.658.223.661,00)
Belanja Modal	Rp 1.128.632.025	Rp 1.666.626.350	Rp 1.111.334.700	Rp 632.039.000	98,47%	37,92%	179.331.441,67	(159.765.233,33)

Sumber : Laporan CALK DISHUB

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki adanya kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, antara lain :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **A. Kekuatan (Strength)**

- a. Adanya Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016;
- b. Adanya jumlah pegawai yang memadai;
- c. Adanya pemilihan pelajar pelopor sebagai upaya dalam mengurangi kecelakaan di jalan raya;
- d. Pelaksanaan program Smart PJU dan Kwh nisasi untuk mengurangi melonjaknya tarif dasar listrik PJU se kota cirebon;
- e. Pelaksanaan program SALUD (SAdar Lalu lintas Usia Dini);
- f. Pengembangan ATCS;
- g. Penerapan tarif zonasi parkir;
- h. Penerapan akreditasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Peningkatan pelayanan angkutan berupa (BRT, CITROS dan pelayanan angkutan wilayah selatan).

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

- a. Posisi struktur kelembagaan yang sering berubah sesuai dengan peraturan pemerintah
- b. Fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai
- c. Semangat kerja karyawan di lapangan semakin menurun
- d. Distribusi karyawan di lapangan yang tidak merata
- e. Pegawai/pejabat yang sering mutasi, pegawai/pejabat baru kurang menguasai program.
- f. Tenaga Petugas Lapangan terus berkurang

## **2. Lingkungan Eksternal**

### **C. Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya penyerahan kewenangan di bidang perhubungan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten / Kota secara luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. Adanya dukungan masyarakat dan stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perhubungan;
- c. Perhubungan merupakan urat nadi pendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. Adanya rencana Pemerintah untuk memberlakukan wajib uji bagi kendaraan pribadi dan sepeda motor.
- e. Adanya sarana transportasi berbasis aplikasi (online)

### **D. Ancaman (Threat)**

- a. Perlintasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah kota Cirebon (11 perlintasan sebidang) yang menimbulkan tundaan / hambatan lalu lintas;
- b. Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum sehingga tidak efisien dan memiliki kondisi lingkungan usaha yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi pertumbuhan;
- c. Tidak seimbang antara sarana dengan prasarana transportasi;
- d. Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan akibat masih banyaknya hambatan samping seperti PKL, kendaraan parkir dibadan jalan dsb;
- e. Belum terintegrasinya antar / intra moda transportasi
- f. Belum tertata dengan baik jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas di kota Cirebon
- g. Belum optimalnya fungsi terminal tipe C;
- h. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya.

Selain peluang pengembangan untuk pelayanan Perangkat Daerah yang baik guna menunjang hal tersebut ada beberapa program unggulan

dalam 5 (lima) tahun akan datang dilaksanakan di Kota Cirebon oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon, program dan kegiatan tersebut antara lain :

## **2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN TAHUN 2017-2018**

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penyediaan Makanan dan Minuman
- d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- e. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik
- h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- c. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan
- e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas / Lapangan Beserta Perlengkapannya

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
- c. Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap
- d. Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD
- e. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
- f. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- g. Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD

**6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

- a. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

**7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

- a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

**8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

- a. Penataan Tempat – Tempat Pemberhentian Angkutan Umum
- b. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
- c. Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- d. Identifikasi Pengemudi Angkutan Umum
- e. Kajian dan Evaluasi Trayek Angkutan Umum dan Barang
- f. Penyuluhan Keselamatan Pengguna Kendaraan Bermotor

**9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

- a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
- b. Perbaikan Lampu Isyarat Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light)
- c. Penataan dan Pembangunan PJU
- d. Pemeliharaan PJU
- e. Pemeliharaan Marka dan Rambu-Rambu Lalu Lintas



- f. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
- g. Peningkatan Pelayanan Angkutan
- h. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
- i. Penyediaan jasa pelayanan Automatic Traffic Control System dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas

**10. Program Peningkatan Pelayanan UPTD**

- a. Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum
- b. Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

**11. Program Peningkatan Pelayanan Parkir**

- a. Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran
- b. Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Perparkiran
- c. Penertiban dan Pembinaan Perparkiran

**12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Penyusunan kebijakan norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
- b. Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### DINAS PERHUBUNGAN

#### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah Sebagai Berikut :

- a. Perlintasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah kota Cirebon (11 perlintasan sebidang);
- b. Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan;
- c. Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas;
- d. Belum terintegrasinya antar / intra moda transportasi;
- e. Belum optimalnya fungsi terminal tipe C;
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya;

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlntasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah kota Cirebon (11 perlntasan sebidang)	1.1 Menimbulkan tundaan / hambatan lalu lintas	1.1.1 Sering terjadinya kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan adanya perlntas sebidang
2	Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum	2.1 Tidak efisien dalam pelayanan angkutan umum kepada masyarakat	2.1.1 Kondisi lingkungan usaha yang tidak sehat, kehilangan daya saing. 2.1.2 Manajemen pengusaha angkutan yang lemah
3	Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan	3.1 hambatan samping seperti PKL, kendaraan parkir dibadan jalan	3.1.1 Kebijakan dan ketegasan dalam membenahi / pengelolaan PKL dan parkir dibadan jalan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum terintegrasinya antar / intra moda transportasi	4.1 Sistem transportasi yang belum mendukung antar / intra moda transportasi	4.1.1 Kebijakan dan pelaksanaan dalam sistem transportasi yang terintegrasi belum dilaksanakan
5	Belum optimalnya fungsi terminal tipe C	5.1 Prasarana belum dibangun sesuai dengan ketentuan. 5.2 Sumber daya manusia belum tersedia	5.1.1 Anggaran belum tersedia 5.2.1 Kurangnya sumber daya manusia
6	Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya	6.1 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya	6.1.1 Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pemahaman tertib berlalu lintas

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023.

**Visi Walikota terpilih tahun 2018 - 2023 adalah:**

**“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon sebagai Kota KREATIF Berbasis Budaya dan Sejarah”**

**Misi Walikota terpilih tahun 2018 - 2023 adalah:**

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan. Hal ini ditunjukkan melalui:

**a. Pernyataan misi ke 3:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan dalam memberikan penyediaan sarana angkutan umum massal yang murah dan ramah lingkungan.

**b. Pernyataan misi ke 4:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan dalam peningkatan operasional penertiban umum.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon 2018-2023, Dinas Perhubungan secara langsung mendukung keberhasilan Walikota dan Wakil Walikota pada misi 3 yaitu memberikan penyediaan sarana angkutan umum massal yang murah dan ramah lingkungan di Kota Cirebon dan misi 4 yaitu peningkatan operasional penertiban umum di Kota Cirebon.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan Tahun 2010 – 2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan

transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai Tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015 – 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

#### **B. Pelayanan Transportasi**

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;

6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*.

### **C. Kapasitas Transportasi**

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perkembangan Wilayah Kota Cirebon yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Cirebon ke arah yang semakin terkendali.

Di lain pihak, untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanat yang paling mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam konteks amanat undang-undang ini penyusunan RTRW wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kota Cirebon juga wajib melakukan KLHS sesuai amanat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS RTRW Kota Cirebon 2018-2028 ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program RTRW Kota Cirebon 2018-2028 terhadap pembangunan berkelanjutan di Wilayah Kota Cirebon;
2. Tersusunnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program RTRW Kota Cirebon 2018-2028 yang telah mengintegrasikan pertimbangan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Cirebon.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2032 dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun 10 (sepuluh) tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (development sustainable)



### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Pengembangan Taman Edukasi Lalu Lintas;
2. Pengembangan ATCS;
3. Angkutan Massal Perkotaan;
4. Perlintasan Kereta Api Sebidang;
5. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi (online);
6. Aksesibilitas Transportasi Bandara Kertajati;
7. Pengaturan Angkutan Barang Dalam Kota;
8. Pengembangan Kualitas SDM Dinas Perhubungan yang Handal dan Profesional.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan;
2. Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat .

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran perlu ditetapkan yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, maka sasaran dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran :

1. Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas;
2. Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini :



Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan		Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C	Nilai C	Nilai B	Nilai B	Nilai B
		Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	4 titik	3 titik	2 titik	1 titik
2	Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat		Tingkat Penggunaan Angkutan Umum (Moda Share)	40%	50%	60%	70%	80%
		Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah.

#### **5.1. Strategi**

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Langkah yang akan ditempuh Dinas Perhubungan untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif .

#### **5.2 Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas



pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan cakupan pelayanan perhubungan adalah sebagai berikut:



**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**

VISI : "SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH

MISI I : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan	tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar



MISI II: "Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu
		Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor
		Menata sistem perpakiran yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir	Penerapan / perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Lampiran VI.1. xls** yang bersumber dari Tabel T-C.27.



Tabel : T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI			
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (juta)					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)							
Tujuan 1																						
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan				Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C	Nilai C	2509	Nilai C	5027	Nilai B	4975	Nilai B	5080	Nilai B	5567	Nilai B	22958	Dishub				
	Sasaran																					
	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas			Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	5 titik	2.509	4 titik	5.027	3 titik	4.975	2 titik	5.080	1 titik	5.567	1 titik	22.958	Dishub				
		2	09	1	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis)	100%	100%	425	100%	400	100%	430	100%	350	100%	490	100%	2095	Dishub	kota Cirebon
						Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
		2	09	1	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas, Dokumen Laporan Forum LLAJ dan Dokumen kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 dok, 1 dok, 1 dok	1 dok, 1 dok, 1 dok	350	1 dok, 1 dok, 1 dok	350	1 dok, 1 dok, 1 dok	350	1 dok, 1 dok, 1 dok	350	1 dok, 1 dok, 1 dok	1.750	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon		
		2	09	1	15	03	Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	Terselenggaranya sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	2 kali	2 kali	75	-	0	2 kali	80	-	0	2 kali	90	2 kali	245	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon
		2	09	1	15	04	Perencanaan bahan analisis audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	tersedianya dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	-	0	0	1 dok	50	0	0	0	0	1 dok	50	1 dok	100	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	100%	100%	100	100%	200	100%	150	100%	150	100%	150	100%	750	Dishub	kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2	09	1	16	01	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	100%	100%	100	Overhaul Foton 100%	200	Overhaul Port 100%	150	Overhaul Break system 100%	150	Overhaul Axel Play 100%	150	100%	750	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Cirebon
		2	09	1	18		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	80%	83,51%	1.794	85%	3.827	87%	3.600	90%	3.875	92%	4.002	92%	16.898	Dishub	kota Cirebon
								Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	80%	83,78%		85%		87%		90%		92%		92%			
								Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %	80%	83,97%		85%		87%		90%		92%		92%			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI		
										2019		2020		2021		2022		2023							
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					Target	Rp. (juta)
		2	09	1	18	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	tersedianya pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	20 unit	-	0	10 unit	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon	
		2	09	1	18	02	Pengadaan marka jalan	tersedianya pengadaan marka jalan (separator, marka tanda, paku jalan, traffic cone) untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	0 M <sup>2</sup>	-	0	787 M <sup>2</sup>	200	787 M <sup>2</sup>	200	787 M <sup>2</sup>	200	787 M <sup>2</sup>	200	787 M <sup>2</sup>	200	787 M <sup>2</sup>	800	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon
		2	09	1	18	03	Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (traffic light)	berfungsinya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	28 titik simpang / tahun	28 titik simpan g / tahun	150	28 titik simpan g / tahun	150	28 titik simpan g / tahun	200	28 titik simpan g / tahun	200	28 titik simpan g / tahun	250	28 titik simpan g / tahun	950	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon		
		2	09	1	18	04	Penataan dan Pembangunan PJU	Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	600 Titik	40 titik	668	58 titik	1000	58 titik	1000	58 titik	1.000	58 titik	1.000	58 titik	4.668	UPTD Penerangan Jalan Umum	Kota Cirebon		



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI	
										2019		2020		2021		2022		2023						
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target
		2	09	1	18	05	Pemeliharaan PJU	Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan	6775 Titik	1 Tahun (6775 Titik)	600	1 Tahun (6775 Titik)	1200	1 Tahun (6775 Titik)	1200	1 Tahun (6775 Titik)	1200	1 Tahun (6775 Titik)	1200	1 Tahun (6775 Titik)	5.400	UPTD Penerangan Jalan Umum	Kota Cirebon	
		2	09	1	18	06	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	berfungsinya rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	1 Tahun	1 Tahun	56	20 titik	227	20 titik	250	20 titik	275	20 titik	302	20 titik	1.110	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon	
								berfungsinya marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas				500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>	500 M <sup>2</sup>				
		2	09	1	18	07	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	1 Tahun	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1.000	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
		2	09	1	18	08	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	1 dok	1 dok	74	1 dok	200	1 dok	250	1 dok	250	1 dok	250	1 dok	1.024	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon
		2	09	1	18	09	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota cirebon	3 orang	-	0	3 orang	125	3 orang	150	3 orang	175	3 orang	200	3 orang	650	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	18	10	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	-	-	0	1 paket pekerjaan	200	-	0	1 paket pekerjaan	200	1 paket pekerjaan	200	1 paket pekerjaan	600	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon
		2	09	1	18	11	Penyediaan jasa pelayanan Automatic Traffic Control System (ATCS) dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN)	Terfasilitasinya pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 orang	2 orang	46	3 orang	125	3 orang	150	3 orang	175	3 orang	200	3 orang	696	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
		2	09	1	21		Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	73,44%	73,44%	190	77,11%	600	80,97%	795	85,02%	705	89,27%	925	89,27%	3.215	Dishub	kota Cirebon
		2	09	1	21	01	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	1 Tahun	1 Tahun	190	buku karcis, bbm, atk selama 1 Tahun	450	buku karcis, bbm, atk selama 1 Tahun	495	buku karcis, bbm, atk selama 1 Tahun	540	buku karcis, bbm, atk selama 1 Tahun	595	buku karcis, bbm, atk selama 1 Tahun	2.270	UPTD Parkir	Kota Cirebon
		2	09	1	21	02	Kegiatan Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Perparkiran	Tersedianya dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran	-	-	0	-	0	1 Dok	150	-	0	1 Dok	150	1 Dok	300	UPTD Parkir	Kota Cirebon
		2	09	1	21	03	Penertiban dan Pembinaan Perparkiran	terwujudnya pemahaman tentang aturan, tugas dan tanggung jawab petugas parkir	-	-	0	4 kali	150	4 kali	150	4 kali	165	4 kali	180	4 kali	645	UPTD Parkir	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI			
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (juta)					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)							
Tujuan 2																						
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat						Rasio Kendaraan Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk	-	40%	1324	50%	3110	60%	3227	70%	3050	80%	3792	80%	14503	Dishub		
	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan					Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	-	5 unit	1.324	7 unit	3.110	8 unit	3.227	9 unit	3.050	10 unit	3.792	10 unit	14.503	Dishub		
		2	09	1	17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	0,0030	0,0030	565	0,0031	1.980	0,0032	2.060	0,0033	1.820	0,0034	2.500	0,0034	8.925	Dishub	kota Cirebon	
						Jumlah Uji Kir	12.202	12.202		12.568		12.945		13.333		13.733		13.733				
						Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	19%	19%		20%		20%		21%		21%		21%				
		2	09	1	17	01	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	-	-	0	1 dok 50 orang	110	1 dok 50 orang	120	1 dok 50 orang	130	1 dok 50 orang	140	1 dok 50 orang	500	Bidang Angkutan dan Multimoda	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2	09	1	17	02	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	terselenggaranya sosialisasi tentang disiplin kepada masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas	-	-	0	3 kali	75	-	0	-	0	3 kali	75	3 kali	150	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	17	04	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan	22 halte	2 halte	150	6 halte	550	6 halte	550	6 halte	550	6 halte	550	6 halte	2.350	Bidang Lalu Lintas	Kota Cirebon
		2	09	1	17	05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Angkutan Jasa Angkutan	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang aman, nyaman dan ramah	-	5 Unit	600	10 Unit	800	10 Unit	800	10 Unit	800	10 Unit	800	10 Unit	3.800	Bidang Angkutan dan Multimoda	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
		2	09	1	17	06	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan	-	-	0	-	0	2 kali	150	-	0	2 kali	200	2 kali	350	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	17	07	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	- Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat kota Cirebon - Terbinanya sopir / awak angkutan umum	3 orang	3 orang	50	3 orang	150	3 orang	170	3 orang	170	3 orang	190	3 orang	730	Bidang Angkutan dan Multimoda	Kota Cirebon
		2	09	1	17	08	Pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar	200 orang 2 bulan	200 orang 2 bulan	315	200 orang 2 bulan	420	200 orang 2 bulan	420	200 orang 2 bulan	420	200 orang 2 bulan	420	200 orang 2 bulan	1.995	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	17	09	Identifikasi Pengemudi Angkutan Umum	meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada angkutan umum	979 supir angkot	-	0	979 supir angkot	200	979 supir angkot	200	979 supir angkot	200	979 supir angkot	200	979 supir angkot	800	Bidang Angkutan dan Multimoda	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2	09	1	17	11	Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	terciptanya satpam yang memiliki K3, tertib dan disiplin di kota Cirebon	3 orang	-	0	30 orang	150	30 orang	200	30 orang	200	30 orang	200	30 orang	750	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	17	12	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	20 orang	20 orang	50	50 orang	125	50 orang	150	50 orang	150	50 orang	175	50 orang	650	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	17	13	pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	tersedianya dokumen uji pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	-	-	0	-	0	1 dok	100	-	0	1 dok	100	1 dok	200	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	17	14	Penyediaan sistem pelayanan terminal penumpang tipe C	Tersedianya dokumen sistem pelayanan terminal penumpang tipe C yang aman, nyaman dan ramah	-	-	0	1 dok	100	-	0	-	0	1 dok	150	1 dok	250	Bidang Angkutan dan Multimoda	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2	09	1	17	15	Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama pengguna kendaraan bermotor	tersedianya dokumen pengawasan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama bagi pengguna kendaraan roda 4 dan angkutan barang	-	-	0	1 dok	100	-	0	-	0	1 dok	100	1 dok	200	Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Kota Cirebon
		2	09	1	20		Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Tersedianya sarana dan prasarana UPTD	100%	100%	759	100%	1.130	100%	1.167	100%	1.230	100%	1.292	100%	5.578	Dishub	kota Cirebon
		2	09	1	20	02	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	1 tahun	1 tahun	120	2 unit kendaraan	250	3 unit kendaraan	275	3 unit kendaraan	325	3 unit kendaraan	375	3 unit kendaraan	1.345	UPTD Penerangan Jalan Umum	Kota Cirebon
		2	09	1	20	03	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	1 tahun	1 tahun	639	3 jenis 1 tahun	880	3 jenis 1 tahun	892	3 jenis 1 tahun	905	3 jenis 1 tahun	917	3 jenis 1 tahun	4.233	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
	Sasaran																						
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik						Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	12.863	85%	16.532	90%	16.435	95%	16.400	100%	16.670	100%	78.480	Dishub		
		2	09	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	100%	100%	11.035	100%	13.240	100%	13.330	100%	13.375	100%	13.415	100%	63.975	Dishub	kota Cirebon
		2	09	1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Petugas/Tenaga kebersihan kantor	7 orang	7 orang	200	8 orang	250	8 orang	275	8 orang	275	8 orang	290	8 orang	1.290	Sekretariat	Kantor Dishub
								- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis	20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis			
		2	09	1	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Surat Kabar Harian Lokal	5 judul	5 judul	19	10 judul	35	10 judul	35	10 judul	40	10 judul	40	10 judul	169	Sekretariat	Kantor Dishub
								- Buku Peraturan Perundang-undangan	4 buku	4 buku		4 buku		4 buku		4 buku		4 buku		4 buku			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
		2	09	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Laporan/Notulensi rapat internal/briefing	12 laporan	12 laporan	141	12 laporan	165	12 laporan	180	12 laporan	195	12 laporan	195	12 laporan	876	Sekretariat	Kantor Dishub
								- Laporan mamin harian pegawai	12 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
								- Laporan penerimaan/kunjungan tamu bagi KDH, WKDH, dan Setda	12 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		2	09	1	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	12 laporan	155	12 laporan	250	12 laporan	300	12 laporan	325	12 laporan	350	12 laporan	1.380	Sekretariat	Kantor Dishub
		2	09	1	01	20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan	8 orang	8 orang	220	10 orang	290	10 orang	290	10 orang	290	10 orang	290	10 orang	1.380	Sekretariat	Kantor Dishub
		2	09	1	01	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- ATK	37 jenis	37 jenis	80	40 jenis	200	40 jenis	200	40 jenis	200	40 jenis	200	40 jenis	880	Sekretariat	Kantor Dishub
								- Tinta refill	4 jenis	4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis			
								- Barang Cetak	2 jenis	2 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			
								- Penggandaan	87000 lbr	87000 lbr		90000 lbr		90000 lbr		90000 lbr		90000 lbr		90000 lbr			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
		2	09	1	01	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	36 struk	36 struk	10.000	36 struk	12.000	36 struk	12.000	36 struk	12.000	36 struk	12.000	36 struk	58.000	Sekretariat	Kantor Dishub
								- Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon	12 struk	12 struk		12 struk		12 struk		12 struk		12 struk		12 struk			
								- Struk Pembayaran Tagihan Rekening air	12 struk	12 struk		12 struk		12 struk		12 struk		12 struk		12 struk			
								- Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit	12 struk	12 struk		12 struk		12 struk		12 struk		12 struk		12 struk			
		2	09	1	01	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/operasional jabatan:			220		50		50		50		50		420	Sekretariat	Kantor Dishub
								- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4	8 unit	8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit			
								- STNK/SKPD PKB R3	3 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
								- STNK/SKPD PKB R2	42 unit	42 unit		42 unit		42 unit		42 unit		42 unit		42 unit			





Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI					
										2019		2020		2021		2022		2023										
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)									
							- Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		-		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>									
							- Kantor Terminal Dukuh Semar		-		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>		1500 m <sup>2</sup>									
		2	09	1	02	49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas/operasional/jabatan:	-	-	0	500	500	150	500	1.650												
							'-R-2				6 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit													
							-R-4				1 unit	1 unit			1 unit													
							-R-6																					
		2	09	1	02	51	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	-	-	0	20 jenis	225	20 jenis	225	20 jenis	225	20 jenis	225	20 jenis	900							
		2	09	1	02	53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan	Servis:			1.080	1.100	1.150	1.200	1.250	5.780												
							- Kendaraan R-2	42 unit	42 unit		42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit												
							- Kendaraan R-3	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit												
							- Kendaraan R-4	8 unit	8 unit		8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit												
							- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)	8 unit	8 unit		8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit												
							Suku cadang:																					
							- Kendaraan R-2	42 unit	42 unit		42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit												
							- Kendaraan R-3	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit												
							- Kendaraan R-4	8 unit	8 unit		8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit												
							- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)	8 unit	8 unit		8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit												
							Pelumas :																					
							- Kendaraan R-2	42 unit	42 unit		42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit												



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
							- Kendaraan R-3	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit						
							- Kendaraan R-4	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit						
							- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit						
							Bahan Bakar :																
							- Kendaraan R-2	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit						
							- Kendaraan R-3	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit						
							- Kendaraan R-4	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit						
							- Kendaraan R-6 (Truk dan Bus)	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit						
		2	09	1	02	55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7 jenis	7 jenis	15	7 jenis	60	7 jenis	70	7 jenis	80	7 jenis	80	7 jenis	305	Sekretariat	Kantor Dishub
		2	09	1	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100%	100%	350	100%	400	100%	350	100%	400	100%	350	100%	1.850	Dishub	kota Cirebon
		2	09	1	03	07	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	- Pakaian Dinas Harian	130 stel	130 stel	350	130 stel	400	130 stel	350	130 stel	400	130 stel	350	130 stel	1.850	Sekretariat	Kantor Dishub
							- Pakaian Dinas Lapangan	500 pcs	500 pcs		500 pcs		500 pcs		500 pcs		500 pcs		500 pcs				
							- Pakaian Olahraga	-	-		130 stel		-		130 stel		-		-				
		2	09	1	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Hasil Penilaian Kinerja ASN pasa survey kepuasan pelanggan	80%	80%	0	85%	250	90%	50	95%	250	100%	50	100%	600	Dishub	kota Cirebon



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2	09	1	05	19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Laporan sinergitas dan capacity building bagi pegawai PD	130 orang	-	0	130 orang	250	-	50	130 orang	250	-	50	-	600	Sekretariat	Kantor Dishub
								Laporan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat	-			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok					
		2	09	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja keuangan SKPD	100%	100%	232,7	100%	282,0	100%	260,0	100%	245,0	100%	300,0	100%	1.319,7	Dishub	kota Cirebon
		2	09	1	06	01	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan triwulan	4 dok	4 dok	52	4 dok	52	4 dok	55	4 dok	55	4 dok	55	4 dok	269	Sekretariat	Kantor Dishub
								Laporan tahunan	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
								Laporan movev	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok			
								Dokumen LKIP	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
								Laporan PK	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
								Laporan RKT	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
		2	09	1	06	08	Penyusunan RKA/ DPA dan Perubahanya	Dokumen RKA	1 dok	1 dok	12	1 dok	15	1 dok	20	1 dok	20	1 dok	20	1 dok	87	Sekretariat	Kantor Dishub
								Dokumen RKAP	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
								Dokumen DPA	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
								Dokumen DPPA	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2	09	1	06	09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan kinerja bulanan PTT	1 dok	1 dok	39,6	1 dok	40,0	1 dok	45,0	1 dok	45,0	1 dok	45,0	1 dok	215	Sekretariat	Kantor Dishub
		2	09	1	06	14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil PD	-	-	115	1 dok	150	-	100	-	100	1 dok	150	1 dok	615	Sekretariat	Kantor Dishub
								Website PD yang dibangun/dipelihara	1 website	1 website		1 website		1 website		1 website		1 website		1 website			
		2	09	1	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan akhir tahun (CALK)	1 dok	1 dok	5	1 dok	10	1 dok	10	1 dok	10	1 dok	10	1 dok	45	Sekretariat	Kantor Dishub
		2	09	1	06	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renstra PD	1 dok	-	9,1	-	15	-	15	-	15	1 dok	20	1 dok	74	Sekretariat	Kantor Dishub
								Dokumen Renstra Perubahan PD	1 dok	-		-		-		-		1 dok		1 dok			
								Dokumen Renja PD	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
								Dokumen Renja PD Perubahan	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
								Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah	-	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2	09	1	06	17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP PD	1 dok	-	0	-	0	1 dok	15	-	0	-	0	-	15	Sekretariat	Kantor Dishub
		2	09	1	22		Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan	100%	100%	0	100%	75	100%	50	100%	75	100%	50	100%	250	Dishub	kota Cirebon
		2	09	1	22	01	Penyusunan Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersedianya Peraturan Daerah urusan Perhubungan	-	-	0	1 perda	75	-	0	1 perda	75	-	0	-	150	Sekretariat	Kantor Dishub
		2	09	1	22	02	Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Terinformasikan ya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan	-	-	0	-	0	1 dok	50	-	0	1 dok	50	1 dok	100	Sekretariat	Kantor Dishub



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang mendukung sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada **tabel 7.1** yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini :



**Tabel VII.1 (T.C 28)**  
**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	5 titik	4 titik	3 titik	2 titik	1 titik	1 titik
2	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	5 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit	10 unit



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon tahun 2018-2023. Dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan bagi perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) selama lima tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju terwujudnya Kota Cirebon yang Berbudaya dan Bersejarah.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON**

  
**Drs. H. ATANG HASAN DAHLAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631008 198402 1 001


## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 dapat terselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pengambil kebijakan di bidang perhubungan serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018 yakni dengan visi Walikota terpilih adalah “*Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah*”.

Cirebon, 12 Maret 2019  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOTA CIREBON



**Drs. H. ATANG HASAN DAHLAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631008 198402 1 001



# DAFTAR ISI

Hal	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	1.1 Latar Belakang..... 1
	1.2 Landasan Hukum.....2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....4
	1.4 Sistematika Penulisan.....5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS
	PERHUBUNGAN.....7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..... 7
	2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan..... 22
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan..... 27
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan..... 32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
	DINAS PERHUBUNGAN..... 37
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..... 37
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....38
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... 39
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 41
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis..... 43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN..... 44
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 44
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 46
	5.1 Strategi.....46
	5.2 Kebijakan..... 46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
	SERTA PENDANAAN..... 50



BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	
	URUSAN.....	72
BAB VIII	PENUTUP.....	74



## DAFTAR TABEL

		Hal
II.1	Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan.....	22
II.2	Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	23
II.3	Susunan Pegawai Berdasarkan Struktural.....	23
II.4	Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	24
II.5	Barang Aset Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode: 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017.....	26
T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	28
T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	30
T-B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah.....	37
T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	48
T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	51
T-C.28	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	73